



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110 Tromol Pos Nomor 1020
Telepon. (021) 3843348 – 3810350 – 3454546; www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8/BUA/KP7/IX/2025 Jakarta, 16 September 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : Rapat Pendataan Honorer Non-DIPA Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

Kepada Yth.

1. Sekretaris pada Unit Eselon I Mahkamah Agung;
2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
3. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

Sehubungan dengan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 15187/SEK/KP7/IX/2025 tanggal 12 September 2025 Perihal Pendataan Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

Hari, tanggal : Jumat, 19 September 2025
Waktu & agenda : 14.00 WIB - selesai
Tempat : *Zoom Meeting*
Meeting ID : 875 0188 8413
Passcode : 535105
Agenda : Rapat Pendataan Honorer Non-DIPA Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i hadir tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI

Sobandi

Tembusan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung;
3. Sekretaris Mahkamah Agung.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 212 Jakarta 15160 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15187/SEK/KP7/IX/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Pendataan Tenaga Honorer Non DIPA dan
tidak dibayarkan Bank Mitra

Jakarta, 12 September 2025

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
2. Sekretaris pada Unit Eselon I Mahkamah Agung;
3. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
4. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas Data Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Kerja menyampaikan Data Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan.
2. Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra tersebut telah bekerja minimal sejak Januari 2024 dan masih aktif bekerja sampai dengan saat ini.
3. Satuan kerja bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan, dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format terlampir dan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra (*format pdf maksimal 1 MB*).
4. Data disampaikan melalui tautan <https://s.id/whsRY> paling lambat tanggal 19 September 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;



LAMPIRAN

Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,
Nomor : 15187/SEK/KP7/IX/2025
Tanggal : 12 September 2025

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : <<nama_sekretaris_satuan_kerja>>
NIP/NRP : <<nip/nrp_sekretaris_satuan_kerja>>
Pangkat/Gol. Ruang : <<pangkat/gol.ruang>>
Jabatan : <<jabatan_sekretaris_satuan_kerja>>
Satuan Kerja : <<nama_satuan_kerja>>

dengan ini menyatakan bahwa Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra di bawah ini:

Nama : <<nama_ppnnpn>>
Tempat/Tanggal Lahir : <<ttl_ppnnpn>>
NIK : <<nik_ppnnpn>>
Satuan Kerja : <<satuan_kerja>>

Merupakan Tenaga Honorer Non DIPA dan tidak dibayarkan Bank Mitra pada <<nama_satuan_kerja>> yang saat ini masih aktif bekerja dari tanggal <<tanggal_awal_bekerja>> sampai dengan saat ini.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dan diperiksa oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<<kota>>, <<tanggal>>

Yang membuat pernyataan,

Meterai konvensional
dan tanda tangan

<<Nama Sekretaris>>

<<NIP>>